



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN
2013 TENTANG DANA KESEJAHTERAAN NELAYAN DI
KABUPATEN PATI**

JURNAL

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Strata I
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro

NAUFAN REDHA SETYAJI

14010112130069

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2016

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 Tentang

Dana Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Pati

Naufan Redha Setyaji

ABSTRAK

Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan di Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini, instansi yang paling berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati adalah Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dimana yang menjadi narasumber adalah pihak yang terkait dengan peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan di Kabupaten Pati. Narasumber dipilih berdasarkan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki kaitanya dengan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati yaitu pihak Dinas kelautan dan prikanan Kabupaten Pati serta ketua kelompok usaha bersama (KUB) nelayan sebagai agen pelaksana di tingkat bawah.

Hasil penelitian ini adalah masih banyak terjadi permasalahan dalam implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati. Permasalahan terjadi pada proses pendataan yang tida valid sehingga dana bantuan tidak bisa tersalurkan dengan baik kepada nelayan yang seharusnya benar-benar masuk kategori sebagai penerima bantuan dari dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati. Hasil penelitian selanjutnya adalah besaran dana yang diberikan untuk bantuan dana pakeklik nelayan terlalu kecil sehingga dana bantuan tersebut tidak dapat menutup kebutuhan nelayan pada musim pakeklik.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Nelayan.

Implementation of Regent Decree 50/2013 on Fishermen Welfare Fund

in Pati Regency

Naufan Redha Setyaji

ABSTRACT

This study aimed to find out the implementation of the Regent Decree 50/2013 on the fishermen welfare fund in Pati Regency. The Municipal Office of Maritime Affairs and Fisheries of Pati Regency became the most influential institution in the implementation of the decree. This study using implementation theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, especially the factors affected the implementation of a program. The study applied a qualitative approach and a descriptive research method. Research data were collected by interview with concerned respondents. The respondents from the government institution consisted of those with capacity and authority dealing with the implementation of the Regent Decree 50/2013. Whereas, the respondents outside the government institutions were selected from leaders of fishermen collective unit (KUB) as the performing agents on at the lower tiers.

The study found that the implementation of the Regent Decree 50/2013 on the fishermen welfare fund in Pati Regency was still overshadowed by multiple problems, such as invalid data recording, which led to funding misallocation. This misallocated funding had cause improper distribution where many fishermen did not get the fund they needed. In addition, the study also found that the amount of the funding was inadequate to fulfill the need during bad season.

Keywords: fishermen, implementation, fishermen.

1. Pendahuluan

Pesatnya hasil produksi hasil perikanan di Indonesia serta sumbangnya yang besar terhadap PDB khususnya dari usaha penangkapan ikan laut, sayangnya masih belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sebagian besar nelayan di Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2012 nilai hasil produksi nelayan di Kabupaten Pati mencapai Rp. 204.844.705.000 dan pada tahun 2015 nilai hasil tangkap nelayan di Kabupaten Pati mencapai Rp.344.267.121.600.¹ Nilai ekonomi yang begitu besar dari hasil produksi perikanan justru lebih banyak dinikmati oleh pelaku ekonomi diluar nelayan. Salah satu faktor penyebab masih berlangsungnya kemiskinan nelayan adalah kurang efisiennya sistem pemasaran ikan, Selain faktor-faktor lain seperti rendahnya teknologi penangkapan yang digunakan, skala usaha kecil, serta status nelayan yang sebagian besar sebagai buruh nelayan. Hal semacam ini terjadi juga pada nelayan di Kabupaten Pati , Jawa Tengah.

Kabupaten Pati terdapat sungai besar yang langsung menyambung di laut yaitu sungai Juwana. Melihat dari kondisi geografisnya yang berada di daerah pesisir maka kebanyakan warganya yang bermata pencaharian sebagai seorang Nelayan atau pun sebagai petani ikan di tambak. .

Pada tahun 2015 jumlah nelayan di Kabupaten Pati yang terdaftar mencapai 6.248 orang. jumlah ini terdiri dari 4.963 orang buruh dan 1285 orang juragan

¹Data hasil verifikasi produksi kelautan Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati 2015

nelayan². Melimpahnya potensi hayati yang dikandung oleh laut disekitar tempat tinggal nelayan seyogyanya dapat menjadi suatu asset yang besar bagi upaya peningkatan taraf ekonomi nelayan itu sendiri, namun kenyataannya sampai saat ini kehidupan nelayan masih saja berada dalam ketidakmampuan dalam hal finansial yang membuat nelayan terus berada dibawah garis kemiskinan.

Permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Bupati Pati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati dan mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati yang merupakan upaya untuk mensejahterakan kehidupan nelayan di Kabupaten Pati khususnya Desa Banyutowo.

2. Teori dan Metoda

2.1 Teori

Pada penelitian Implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati ini, fokus penelitian berada pada mendeskripsikan bagaimana Implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan keijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi program. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi program merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang

²*Op. cit.*

maupun sekelompok orang, baik pemerintah maupun swasta agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan program.

Berhasil atau tidaknya suatu implementasi program dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam pengimplementasian program dipengaruhi oleh enam indikator, yaitu :

a. Standar dan sasaran program

Suatu program harus memiliki standar dan sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik antar pelaksana program dan tujuan dari program pun dapat tercapai dengan baik.

b. Sumber daya

Sumber daya dalam hal ini dibagi menjadi tiga elemen, yaitu sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya metoda. Dari ketiga elemen tersebut, sumber daya yang paling tinggi tingkatannya yaitu sumber daya manusia, karena sumber daya manusia selain sebagai subjek program juga menjadi objek program.

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam pengimplementasian suatu program diperlukan hubungan yang baik antara aktor-aktor yang terlibat. Hubungan tersebut yaitu berupa komunikasi dan koordinasi. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar aktor yang terlibat, maka program atau kebijakan yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

d. Karakteristik agen pelaksana

Agar implementasi suatu program dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengidentifikasian dan pengetahuan mengenai karakteristik agen pelaksana program, yang meliputi struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

e. Disposisi implementor

Sikap atau disposisi pelaksana program dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : (1) respon pelaksana program terhadap program. Hal ini berkaitan dengan kemauan pelaksana program untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan; (2) kondisi, yaitu pemahaman pelaksana program terhadap program yang telah ditetapkan; (3) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

f. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Variabel ini meliputi beberapa bagian, yaitu : (1) sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi suatu program; (2) dukungan dari para kelompok kepentingan dalam implementasi program; (3) karakter partisipan, apakah memberikan dukungan atau penolakan; dan (4) sifat opini publik yang berada di lingkungan dan apakah elit politik memberikan dukungan kepada implementasi program.

Penelitian ini menggunakan keenam indikator yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yaitu standar dan sasaran program, sumber daya (manusia dan material), komunikasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi

implementor dan lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam Implementasi Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati.

2.2 Metoda

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, beberapa pelaksana program EMAS di Kabupaten Tegal, Penanggung Jawan program EMAS Provinsi Jawa Tengah, Bappeda, beberapa fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat Kabupaten Tegal.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data teks yang berupa dokumen-dokumen dan kata-kata tertulis dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data yang digunakan digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau informannya. Data primer merupakan sumber data utama yang berasal dari kata-kata dan tindakan informan yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data tersebut dapat dituangkan sementara ke dalam catatan atau

ringkasan tertulis, foto maupun melalui perekaman menggunakan alat perekam suara yang kemudian dideskripsikan dan dianalisa ke dalam laporan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya atau informannya. Data sekunder bersumber dari luar kata-kata dan tindakan informan sehingga data ini merupakan sumber kedua dalam suatu penelitian kualitatif. Dilihat dari segi sumbernya, data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, arsip, internet, media massa elektronik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi (pengamatan). Kaitannya dengan wawancara, peneliti membuat perjanjian dengan informan untuk mengadakan wawancara dengan maksud tertentu yang sesuai dengan penelitian. Pada kegiatan wawancara tersebut, peneliti mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus. Sedangkan observasi, peneliti melakukan pengamatan dengan cara melihat, mendengar, maupun memahami atas perilaku, kejadian, dan situasi sebagaimana yang terjadi sebenarnya yang kemudian dituangkan ke dalam catatan, foto maupun rekaman suara.

Sesuai dengan pernyataan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaktif. Menurut Huberman dan Miles, model analisis interaktif terdiri dari tiga hal, yaitu :

a. Reduksi Data

Proses reduksi merupakan proses yang berkelanjutan selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis, di mana dalam tahap ini bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisir data sehingga memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks-teks, namun dapat juga dilengkapi dengan bentuk lain, seperti bagan maupun grafik.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, proses penarikan kesimpulan dapat berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses reduksi dan penyajian data, kemudian baru dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Namun kesimpulan tersebut bukanlah kesimpulan akhir, karena dalam proses penelitian ini peneliti

dapat melakukan verifikasi terhadap hasil temuannya di lapangan. Sehingga kesimpulan tersebut dapat mendorong peneliti untuk lebih memperdalam proses wawancara dan observasi.

3. Hasil Penelitian

3.1 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Dana Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Pati

Pemberian dana kesejahteraan kepada nelayan di Kabupaten Pati bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya nelayan yang masih berada di bawah garis kemiskinan yang kebanyakan adalah nelayan kecil. Namun dengan pertumbuhan penduduk dan penurunan hasil laut, membuat pendapatan nelayan menurun dan hal ini berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat nelayan, sehingga makin banyak masalah yang dialami oleh nelayan. Oleh karena itu, dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan di Kabupaten Pati , pemerintah Kabupaten Pati membuat suatu kebijakan yang diatur dalam sebuah Peraturan Bupati , yaitu Perbup Nomor 50 Tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati .

3.1.1 Kondisi Lingkungan

Salah satu faktor yang penting dalam perumusan suatu kebijakan adalah pengaruh dari lingkungan kebijakan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap isi kebijakan , sebab melalui lingkungan, pelaku kebijakan dapat menyusun sebuah isu yang akan

diangkat sebagai acuan pembuatan kebijakan. Dalam membuat suatu kebijakan, tentunya harus berdasarkan input yang diperoleh dari masyarakat atau publik, harapan atau tuntutan dari masyarakat yang selanjutnya hal ini oleh pelaku kebijakan dijadikan sebuah kebijakan untuk publik sehingga kebijakan yang dilahirkan akan sesuai dan dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Dalam melahirkan sebuah kebijakan, para pelaku kebijakan menginput berbagai masukan dari lingkungan yang kemudian di musyawarahkan sehingga menjadi sebuah kebijakan untuk masyarakat. Peraturan Bupati no 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati dibuat berdasarkan prakarsa dari masyarakat nelayan yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan umumnya adalah nelayan tradisional, yang kemudian di sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pati memandang perlu adanya pemberian dana bantuan untuk masyarakat nelayan miskin untuk mengatasi masalah kesejahteraan nelayan yang sampai saat ini masih belum tercapai. Melalui peraturan Bupati ini diharapkan dapat membantu nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya yang kemudian tidak akan timbul lagi masalah-masalah terkait kesejahteraan masyarakat nelayan, utamanya adalah nelayan kecil di Kabupaten Pati.

3.1.2 Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya utama dalam implementasi

kebijakan adalah Sumberdaya manusia atau staf. Kegagalan yang sering terjadi adalah yang disebabkan oleh karena sumberdaya manusia yang tidak mencukupi, memadai ataupun kompeten di bidangnya. Diperlukan staf ya dengan keahlian dan kemampuan diperlukan/kompeten dalam mengimplemenngtasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Selain sumber daya manusia, sumberdaya finansial serta sarana dan prasarana juga menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Kepala Seksi (kasi) pengawasan dan pengendalian (Wasdal) sumberdaya ikan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Suharto menanggapi pertanyaan terkait sumberdaya dalam peraturan Bupati no 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan di Kabupaten Pati :

“Sudah memadai kalau dari sumberdaya manusia. khususnya untuk sumberdaya dari dinas kelautan itu sendiri sebagai dinas teknis saya kira sudah memadai, mungkin yang sedikit kurang memadai adalah sumber daya manusia yang dari nelayan itu sendiri yang masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan terkait permasalahan data, karena implementasi perbup ini melibatkan masyarakat nelayan yang di wakili oleh pihak KUB (Kelompok usaha bersama) nelayan. tapi secara umum, SDM untuk perbup ini saya kira sudah memadai dan layak. jadi pihak yang berperan dalam Perbup ini adalah Dinas kelautan dan perikanan, DPPKAD, serta KUB (Kelompok Usaha Bersama) nelayan sebagai kordinator nelayan”³

Adanya antusias yang tinggi dari pihak-pihak terkait cukup beralasan, karena Kabupaten Pati sendiri adalah wilayah pesisir yang notabnya penduduknya banyak

³ Hasil wawancara dengan Suharto selaku kasi wasdal sumber daya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati , 13 Juni 2016 pukul 09. 00 wib di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati

yang bermata pencaharian sebagai nelayan, akan tetapi kehidupan nelayan dirasa masih selalu dibawah garis kemiskinan, untuk itu semua pihak terkait sangat antusias supaya kehidupan nelayan bisa lebih sejahtera.

3.1.3 Hubungan Antar Organisasi

Dalam implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati ini tidak hanya melibatkan satu aktor saja. Di dalamnya terdiri dari beberapa organisasi yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan antar organisasi pelaksana Perbup ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan ini. Jika hubungan antar organisasi berjalan dengan baik maka akan terjalin kerjasama yang baik antar aktor sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Kepala seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati, Suharto menjelaskan hubungan dan komunikasi antar organisasi terkait implementasi peraturan Bupati tentang dana kesejahteraan nelayan sebagai berikut :

“Dalam hubungan antar organisasi tentunya komunikasi berjalan dengan baik, tidak ada masalah dalam komunikasi antara dinas kelautan dan perikanan sebagai pelaksana teknis dengan pemerintah Kabupaten, hubungan juga terjalin dengan baik dengan kordinator nelayan sebagai sasaran peraturan Bupati ini. Jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan

peraturan Bupati ini selalu dikomunikasikan dengan baik untuk dicari jalan keluarnya sehingga masalah dapat teratasi.”⁴

Selama berjalanya implementasi kebijakan sampai saat ini memang komunikasi antar instansi sudah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya hambatan berarti dan rumit yang dihadapi dalam implementasi perbup ini. Sedangkan terkait koordinasi antara dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati dengan nelayan di Kabupaten Pati.

3.1.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati ini tidak hanya melibatkan satu aktor saja. Di dalamnya terdiri dari beberapa organisasi yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan antar organisasi pelaksana Perbup ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan ini. Jika hubungan antar organisasi berjalan dengan baik maka akan terjalin kerjasama yang baik antar aktor sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Kepala seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati, Suharto menjelaskan hubungan dan komunikasi antar organisasi terkait implementasi peraturan Bupati tentang dana kesejahteraan nelayan sebagai berikut :

⁴ Hasil wawancara dengan Suharto selaku kasi wasdal sumber daya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 13 Juni 2016 pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati

“Dalam hubungan antar organisasi tentunya komunikasi berjalan dengan baik, tidak ada masalah dalam komunikasi antara dinas kelautan dan perikanan sebagai pelaksana teknis dengan pemerintah Kabupaten, hubungan juga terjalin dengan baik dengan kordinator nelayan sebagai sasaran peraturan Bupati ini. Jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini selalu dikomunikasikan dengan baik untuk dicari jalan keluarnya sehingga masalah dapat teratasi.”⁵

Selama berjalanya implementasi kebijakan sampai saat ini memang komunikasi antar instansi sudah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya hambatan berarti dan rumit yang dihadapi dalam implementasi perbup ini. Sedangkan terkait koordinasi antara dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati dengan nelayan di Kabupaten Pati ,

3.1.5 standard dan sasaran kebijakan

Untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik maka diperlukan adanya standarisasi agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Standarisasi ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan terutama dalam hal perencanaan, anggaran, implementasi serta evaluasi. Mengenai standarisasi dalam perencanaan dan anggaran, Kepala seksi pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati memebrikan keterangan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan perbup ini tentu terdapat standarisasi dalam hal perencanaan dan anggaran, misalnya dalam proses sosialisasi, pelaksanaanya sesuai dengan prosedur perencanaan dan anggaran sehingga

⁵ Hasil wawancara dengan Suharto selaku kasi wasdal sumber daya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati , 13 Juni 2016 pukul 09. 00 wib di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati

kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. dan lagi dinas-dinas terkait mempunyai tugas masing-masing, jadi kita mempunyai standarisasi masing-masing sesuai dengan kewenangannya”⁶

Dalam standarisasi ini masing-masing implementor memiliki kewenangan masing-masing sehingga tiap instansi memiliki standarisasi dalam pelaksanaan tugas terkait implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan di Kabupaten Pati . Selanjutnya mengenai standarisasi dalam mekanisme pencairan Suharto sebagai Kasi Wasdak sumberdaya ikan Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati menuturkan sebagai berikut :

“Terkait standar dalam mekanisme pencairan tentunya terdapat alur dan SOP yang sudah ada, mekanisme pencairannya adalah nelayan didata oleh KUB yang kemudian KUB memberikan data pada kordinator untuk selanjutnya kordinator menyerahkan data-data nelayan pada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati , lalu direkapitulasi datanya kemudian dimintakan persetujuan kepada Bupati setelah disetujui dan diberi rekomendasi maka dapat mencairkan dana di DPPKAD”

SOP yang ada dalam peraturan Bupati tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan sudah ada dan jelas, jadi mekanisme pencairan dana kesejahteraan ini sudah sistematis mulai dari pendataan nelayan secara langsung sampai pada pencairan dana di DPPKAD

3.1.6 Disposisi implementor

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan

⁶ Hasil wawancara dengan Suharto selaku kasi wasdal sumber daya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati , 13 Juni 2016 pukul 09. 00 wib di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati

atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersifat negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. disposisi implementor terkait Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan di Kabupaten Pati, Suharto selaku Kasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati berpedapat sebagai berikut :

“Dalam implementasi Perbup tentang dana kesejahteraan nelayan ini implementor dan elit politik Kabupaten Pati mendukung sekali terhadap pelaksanaannya, dalam arti pemerintah daerah ingin menambah besaran yang sudah ditetapkan, namun karena terbatasnya dana maka penambahan besaran bantuan mungkin bisa dianggarkan pada tahun berikutnya”⁷

Adanya dukungan dari elit politik seharusnya implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik. Dukungan dari para pemimpin daerah ini merupakan modal penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan dari elit politik di tingkat Kabupaten Pati antara lain dengan adanya rencana penambahan besaran bantuan untuk dana sosial nelayan dan dana paceklik nelayan, akan tetapi terbatasnya dana membuat penambahan besaran bantuan secara signifikan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

⁷ Hasil wawancara dengan Suharto selaku kasi wasdal sumber daya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 13 Juni 2016 pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati

3.2 Hambatan Implementasi Perbup nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentunya ada faktor-faktor yang menjadi penghambat sebuah kebijakan, begitu juga dalam implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati . Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis ditemukan hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Hambatan yang pertama adalah hambatan mengenai besaran dana yang dialokasikan untuk dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati yang masih terlalu kecil. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa pemberian bantuan dana pakeklik nelayam kecil paling banyak Rp 65. 000 (enam puluh lima ribu rupiah) per nelayan setiap tahun, yang diberikan melalui perwakilan atau kordinator yang bertanggung jawab menyalurkan kepada nelayan yang bersangkutan⁸. Kecilnya biaya dana bantuan pakeklik nelayan ini dianggap belum bisa cukup membantu nelayan pada masa pakeklik sehingga hal ini menghambat tujuan dari dari peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati yaitu mensejahterakan Nelayan.

⁸ Peraturan Bupati Pati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati , pasal 14 ayat 2.

2. Hambatan selanjutnya adalah hambatan yang berkaitan dengan pendataan dan keakuratan data. Dalam peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati adalah ditujukan untuk nelayan kecil yang notabnya adalah nelayan miskin, akan tetapi masih sering di daPati nelayan-nelayan besar atau bahkan bukan nelayan yang juga mendapatkan dana bantuan, hal ini mengakibatkan terjadinya kenaikan jumlah penerima bantuan yang menyebabkan pemerintah kesulitan dalam upaya penambahan besaran dana bantuan kesejahteraan, jika data yang benar-benar diperoleh atau data yang diajukan sebagai daftar penerima bantuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan maka bukan tidak mungkin besaran bantuan akan mengalami kenaikan.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati , maka Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati sebagai pelakasana teknis dan KUB nelayan melakukan verifikasi data setiap dua tahun sekali, hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dari tahun ke tahun semakin akurat.

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data-data mengenai implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati yang

berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan temuan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan di Kabupaten Pati belum sepenuhnya berhasil dan efektif. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan ini berdasarkan indikator sebagai berikut : Kondisi lingkungan, hubungan antar instansi, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, standard dan sasaran kebijakan, Disposisi implementor.

Dari indikator kondisi lingkungan dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati sudah memenuhi indikator kondisi lingkungan. Sedangkan berdasarkan indikator hubungan antar instansi implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati sudah cukup baik dimana dalam pelaksanaannya, dimana pembagian tugas, koordinasi, serta komunikasi bila terjadi kesulitan sudah terjalin dengan baik. Hanya saja hubungan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati tidak terjalin langsung dengan masyarakat nelayan di Kabupaten Pati , hubungan secara langsung terjadi antara nelayan dengan Kelompok usaha bersama (KUB) .

Pada indikator sumber daya, implementasi Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati belum berjalan dengan

baik. Terdapat dua sumberdaya disini, yaitu sumber daya instansi dan sumber daya terkait dana. Untuk sumberdaya instansi sudah tersedia dengan baik, dimana Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati sebagai pelaksana teknis peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati sudah menjalankan tugasnya dengan baik serta tugas dari KUB nelayan juga sudah dilakukan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan peran KUB nelayan melakukan pendataan secara langsung kepada nelayan dan nelayan yang di data untuk mendapatkan bantuan adalah nelayan yang benar-benar nelayan kecil dan masuk dalam kategori nelayan miskin. Selanjutnya untuk sumberdaya terkait dana dalam peraturan Bupati Pati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati belum mampu memenuhi standard untuk mensejahterakan nelayan. Dana yang dialokasikan untuk peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati masih terlalu kecil dan belum memberikan dampak berarti bagi kehidupan nelayan terutama pada musim paceklik.

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi langkah-langkah yang mungkin diambil untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi peraturan Bupati nomor 50 tahun 2013 tentang dana kesejahteraan nelayan di

Kabupaten Pati . Rekomendasi langkah-langkah yang mungkin diambil sebagai berikut :

- a. Keterbatasan dana membuat pemerintah Kabupaten Pati tidak bisa secara maksimal dalam memberikan dana bantuan, sehingga nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan pada masa paceklik. Oleh karena itu , diperlukan adanya penambahan jumlah dana guna menambahi besaran bantuan yang diberikan kepada nelayan guna mencapai tujuan untuk mensejahterakan nelayan kecil di Kabupaten Pati .
- b. Kondisi sosio kultural masyarakat nelayan di Kabupaten Pati yang acuh tak acuh membuat pemerintah Kabupaten Pati harus bekerja keras melakukan sosialisasi dan pendataan kepada nelayan agar mendapatkan data yang akurat dan sasaran bantuan yang tepat.
- c. Harus ada upaya untuk membuat data yang valid tidak hanya dengan verifikasi 2 tahun sekali tapi dengan cara Dinas mengawasi langsung proses pendataan dan penetapan data yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di bawah.